

KINERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN TAHUN 2014

Yan Wijaya Putra

20120520162

Departemen Ilmu Pemerintahan dan Politik, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

Pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menangani masalah kesejahteraan masyarakatnya. Banyak permasalahan yang ada dalam masyarakat terutama masyarakat di Indonesia. Contohnya, anak yang berada di jalanan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah kota Yogyakarta. Faktor penyebab anak berada di jalanan baik itu dari faktor keluarga maupun dari segi ekonomi. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staff Lapangan di Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penertiban Anak Jalanan Tahun 2014 di ukur menggunakan lima aspek yaitu aspek produktifitas, dimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta membuat sebuah program, yaitu, keluarga, masyarakat, lembaga sosial dan lembaga pendidikan. Dimana program tersebut bertujuan untuk membuat anak jalanan tidak berada di jalanan lagi dan untuk menjalankan sebuah program tersebut di perlukan sebuah anggaran. Aspek kualitas pelayanan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melakukan pendekatan terhadap anak jalanan dengan mendengarkan dan menanyakan kebutuhan apa yang dibutuhkan anak jalanan dan nantinya Dinas tersebut mencarikan solusinya. Aspek responsivitas, bagaimana tanggapan Dinas tersebut dalam menanggapi masalah, apabila ada pegaduan dari masyarakat tentang ada anak jalanan yang berada di jalanan, apabila anak tersebut ada yang berlaku negatif, dimana dalam hal ini dinas bekerja sama dengan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Masyarakat mengadu ke UPIK melalui sms kemudian UPIK melaporkan kepada Dinas yang bersangkutan. Aspek responsibilitas, pencapaian program dari Dinas tersebut sudah sesuai dengan visi misi yang telah dibuat dan membuat sarana dan prasarana yang di tujukan kepada anak jalanan seperti pelatihan tambal ban, potong rambut dan stell roda. Aspek akuntabilitas, Komunikasi antar pegawai sudah baik dan kedisiplinan para pegawai juga sudah baik. Dilihat dari kelima aspek tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani masalah anak jalanan sudah baik ini dilihat dari jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun menurun. Di tahun 2012 jumlah anak jalanan sebanyak 214 orang, di tahun 2013 sebanyak 58 orang dan di tahun 2014 jumlah anak jalanan sebanyak 54 orang.

Kata kunci : Kinerja Dinas, Penertiban Anak Jalanan

1. PENDAHULUAN

Dalam struktur pemerintahan, dinas memiliki peran yang besar dalam membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Masing masing dinas tersebut juga memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab tersebut dijalankan sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki dinas tersebut. Oleh karena itu penting bagi suatu pemerintahan melakukan evaluasi untuk kemajuannya kedepan agar dapat menjadi tolak ukur. Adapun hal yang diperlukan untuk melakukan evaluasi tersebut

yaitu, peninjauan kinerja. Studi tentang kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dilakukan karena untuk mengetahui hasil kerja yang dicapai oleh suatu dinas dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu instansi dalam hal ini yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pemerintah khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menanggulangi permasalahan masyarakat di

Indonesia. Terutama dilingkungan masyarakat perkotaan yang semakin lama semakin padat karena adanya arus urbanisasi. Masyarakat–masyarakat pedesaan terutama yang masih berada didaerah pedalaman banyak yang masih beranggapan bahwa kerja di kota akan membawa pada kesuksesan, namun hal tersebut tidaklah selamanya benar. Melainkan akan membawa permasalahan bagi mereka sendiri terlebih bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Hal ini dapat memicu timbulnya kesenjangan sosial dan menambah pengangguran diperkotaan. Menjamurnya fenomena–fenomena seperti ini membuat pemerintah harus bekerja ekstra untuk mengelola tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga tidak berdampak pada perekonomian negara.

Selain berdampak pada perekonomian, masalah ini juga berpengaruh terhadap generasi yang akan datang. Dimana banyak anak terlahir dari keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga mengakibatkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dari segi materi maupun segi lainnya seperti pendidikan yang layak. Hal ini menyebabkan munculnya kelompok – kelompok sosial yang meresahkan masyarakat seperti contohnya tuna sosial yang termasuk didalamnya pengemis, anak jalanan, gelandangan, wanita tuna susila, waria, ODHA, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkoba psikotropika dan zat adiktif (NAPZA). Masalah–masalah tersebut merupakan masalah yang sangat mendasar dan dapat membawa masyarakat semakin terpuruk kedalam kemiskinan, sehingga menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial yang lebih jauh.

Dari keseluruhan kasus mengenai tuna sosial, anak jalanan merupakan salah satu fenomena yang sangat umum dialami disetiap kota di Indonesia. Hal ini membutuhkan penanganan dari pemerintah daerah sendiri. Keberadaan anak jalanan tidak lagi hanya berada di kota besar utama seperti Jakarta, tetapi sudah menyebar ke berbagai kota lainnya seperti Semarang, Bandung, dan juga Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri merupakan salah satu kota besar di Indonesia ternyata memiliki permasalahan yang serius tentang tuna sosial dalam hal ini adalah anak jalanan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah ini. Dalam Pasal 34 undang-undang dasar 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Fakir miskin di sini merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan

untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, fakir miskin dapat juga dapat diartikan sebagai orang - orang yang mempunyai sumber mata pencarian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sesuai standar kehidupan. Para gelandangan, pengemis, maupun anak-anak jalanan dapat pula dikategorikan sebagai fakir miskin untuk kemudian dipelihara oleh negara. Negara mempunyai kewajiban tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya.

Berdasarkan data survei dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta jumlah anak jalanan dari tahun 2010-2014 di kota Yogyakarta antara lain, pada tahun 2010 hingga 2011, angka anak jalanan berada di jumlah 142 dan 85 orang dterjadi penurunan dari tahun 2010 ke 2011. Sedangkan di tahun-tahun selanjutnya yaitu 2012, jumlah anak jalanan terjadi peningkatan dengan sangat drastis dari yang sebelumnya berjumlah 85 orang menjadi 214. Pada tahun 2013 jumlah anak jalanan terjadi penurunan yang sangat drastis dari 214 orang menjadi 58 orang dan semakin membaik pada tahun 2014 yaitu sebanyak 54 orang. Hal ini menunjukkan bahwa program anak jalanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial pada tahun-tahun tersebut semakin lama semakin membaik. Akan tetapi di tahun 2012 jumlah anak jalanan mengalami kenaikan. Selanjutnya dari tahun 2012,2013,2014 kinerja Dinas Sosial terbilang baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab anak memilih untuk hidup dijalan dibandingkan tinggal bersama keluarga antara lain yaitu ketidakharmonisan dengan keluarga seperti perceraian, percekocokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak baik itu dikarenakan orang tuanya meninggal dunia maupun mereka yang tidak menjalankan fungsinya. Selain itu kekerasan fisik atau emosional yang dilakukan orang tua juga dapat menjadi salah satu pemicu anak untuk meninggalkan rumah dan turun ke jalanan. Faktor ekonomi keluarga juga dapat memaksa setiap anggota keluarga untuk tetap bertahan hidup dengan cara bergabung atau bahkan menjerumuskan diri untuk hidup dijalan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 tahun 2011 dalam Bab I pasal I tentang anak yang hidup di jalan dijelaskan bahwa Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar

waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kota Yogyakarta telah lama dikenal sebagai kota budaya, kota pendidikan dan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Salah satu daya tarik bagi wisatawan asing maupun wisatawan nusantara untuk berkunjung ke Yogyakarta adalah kawasan Malioboro, yang dikenal sebagai "Shopping Street" bagi para wisatawan. Kegiatan spesifik yang ada di sepanjang jalan Malioboro, meliputi: penjualan souvenir atau cenderamata, baju batik, manik-manik, asesoris atau hiasan, kerajinan kulit, logam, wayang golek dan kulit. Selain itu disepanjang jalan Malioboro dikenal dengan penjualan makanan "lesehan" dan kereta dorong, para pengamen jalanan, penyemir sepatu dan kegiatan sektor Informal lainnya. Bagian sisi lain dari gemerlapan Kawasan Malioboro di Yogyakarta adalah keberadaan anak jalanan, para pengamen jalanan, tukang semir sepatu dan para pengemis "kecil" di perempatan lampu merah. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berpenampilan kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi dan melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan. Anak jalanan memiliki perilaku yang bisa dikatakan sebagai cerminan dari kehidupan yang sudah mereka lalui. Diantara sikapnya yang menonjol adalah ketidakramahan dan perilaku mereka yang kasar. Hal ini bisa dikatakan merupakan akibat dari ketidakadilan dalam bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam masa pertumbuhan mereka baik secara fisik maupun mental. Fenomena ini menyerupai sebuah lingkaran yang tidak pernah putus, dimana para anak jalanan tersebut akan terus terjebak di dalamnya tanpa bisa mencari jalan keluar.

Berdasarkan data yang ada dan telah diuraikan diatas bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta belum sepenuhnya bisa menangani permasalahan anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta. Sehingga anak jalanan harus dapat perhatian lebih dalam penanganan untuk ditertibkan, sehingga tidak meresahkan masyarakat banyak.

Dari latar belakang masalah tersebut pokok masalah dalam hal ini yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Dalam Penertiban Anak Jalanan ?

II. KERANGKA TEORI

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 adalah sebagai berikut: "Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan urusan pelaksana otonom daerah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Anak Jalanan

Menurut Perda No. 6 Tahun 2011 tentang anak jalanan, anak jalanan adalah anak yang hidup di jalan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

4. Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Untuk mengukur kinerja perlu di gunakan aspek-aspek pengukuran kinerja yaitu, yang pertama ada aspek produktifitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Adapun pengukuran dari kinerja sebagai berikut :

1. Aspek Responsivitas

Aspek responsivitas adalah kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan

masyarakat. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program layanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas adalah kemampuan organisasi publik dalam merespon permasalahan-permasalahan serta kebutuhan dan keinginan yang disampaikan melalui aspirasi masyarakat.

2. Aspek Responsibilitas

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit.

3. Aspek Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

4. Aspek Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas selanjutnya mengalami pengembangan yang lebih luas lagi dengan berorientasi pada rasio. Konsep baru ini dikembangkan General Accounting Office (GAO).

5. Aspek Profesionalisme

Aspek Profesionalisme menunjukkan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi karena semakin tumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan semakin canggih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara data yang dikumpulkan berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan – kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Alasannya karena instansi-instansi tersebut sebagai pelaksana program penanganan masalah anak jalanan.

3. Unit Analisa

Dalam penelitian yang diteliti, bisa suatu individu atau bias juga suatu kelompok. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Instansi Terkait lainnya. Dimana mewawancarai 3 orang dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yaitu, Bapak Okto selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan, Ibu Nanik selaku Kepala Seksi di Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, dan yang terakhir dengan Bapak Yosep Widyatmoko selaku Pendamping Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat.

Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara, yaitu dengan :

1. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai.
2. Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap. Meliputi pimpinan dan staf bagian sosial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

- 1) Penelitian Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari literatur buku - buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konseps, teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan.
- 2) Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal - hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini akan dilakukan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumen – dokumen yang bias dijadikan sebagai alat untuk melengkapi penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan responden, menggunakan panduan wawancara. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara sederhana dengan anak jalanan, sebab-sebab mereka mereka berada dijalanan, serta keadaan keluarganya. Wawancara juga dilakukan dengan Kepala

Bidang, Kepala Seksi dan Pendamping Pemberdayaan masyarakat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen diperoleh dari buku-buku literatur tentang masalah sosial Anak jalanan, peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan

6. Teknik Analisa Data

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian analisa kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam suatu birokrasi pemerintah sudah menjadi rahasia umum bahwa kualitasnya masih rendah. Namun hal ini tidak menjadikan alasan utama untuk tetap pesimistis atas perubahan yang mungkin terjadi dalam paradigma pelayanan yang selama ini menempatkan aparat dengan birokrasinya pada posisi yang harus dilayani, tetapi harus berubah kepada paradigma yang menempatkan pengguna jasa pada posisi yang lebih tinggi sehingga kesejahteraan sosial dapat meningkat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan melakukan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ditujukan untuk mempercepat proses kesejahteraan sosial.

Kota Yogyakarta, khususnya dalam masalah ini tentang anak jalanan. Dimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dikatakan sebagai lembaga yang ikut serta dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang berwenang untuk menjalankan segala sesuatu yang bersangkutan dengan tugas sebagai bagian dari pemerintah, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial masyarakat. Dimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus menjalankan visi misi, tugas pokok dan fungsi dari instansi tersebut, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai peranan penting dalam berjalannya suatu program penertiban anak jalanan yang ada di kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini terdapat hal penting berkaitan dengan kinerja dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan cara melihat bagaimana kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani masalah anak jalanan yang ada di kota Yogyakarta.

Maka dari itu diperlukan pengukuran kinerja penertiban anak jalanan sebagai berikut :

1. Produktivitas

Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan program yang telah dibuat, dalam melaksanakan program tersebut di perlukan sebuah anggaran. Produktivitas yang ingin dicari dalam penelitian ini yaitu meliputi program yang dibuat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, dalam program tiap tiap bidang mempunyai program masing masing. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai 4 bidang dan 1 sekretariat, Bidang tersebut ialah Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, Bidang pengembangan Tenaga Kerja. Dalam masalah anak jalanan ini bidang yang menanganinya adalah bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial. Berikut program-program dari bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta :

a. Keluarga

Dalam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk melakukan penurunan jumlah anak yang berada di jalanan dilihat dari aspek Produktivitas yang dilakukan

oleh dinas tersebut pertama yaitu melalui program pendekatan keluarga. Dimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melakukan pendekatan keluarga kepada anak jalanan yang sudah terjaring dimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memberikan pembinaan, pendidikan kepada orang tua dari anak jalanan yang sudah terjaring, jika mereka masih mempunyai orang tua maka orang tua mereka akan di berikan pendidikan. Pendidikan tentang hak-hak anak, seharusnya mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan perlunya pengawasan dari orang tua tersebut sehingga anak mereka tidak berada atau beraktifitas di jalanan yang bisa membahayakan nyawa mereka.

Kegiatan program keluarga ini dilakukan setahun sekali oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Adapun wilayah-wilayah tempat penjangkau anak jalanan yaitu di bagi menjadi 3 wilayah, yaitu Tim I Wilayah Utara (Kecamatan Jetis, Kecamatan Gendongtengen, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Danurejan). Kemudian Tim II Wilayah Tengah (Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Pakualaman). Dan Tim III Wilayah Selatan (Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede).

Dengan adanya program keluarga tersebut, dapat di lihat jumlah anak yang berada di jalanan dari tahun ke tahun semakin menurun.

b. Masyarakat

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta membuat program yang khususnya untuk penangan anak jalanan yaitu program masyarakat. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta membuat Tim Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berjumlah 70 orang. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ini adalah sebagai Tim penjangkau yang mana untuk menjangkau anak jalanan yang ada diseluruh wilayah kota Yogyakarta. Tim Pekerja Sosial Masyarakat sebagai Tim Penjangkau yang bekerja di bagi menjadi 3 wilayah yang setiap wilayahnya terbagi beberapa orang. Kegiatan ini dilakukan di beberapa wilayah, yaitu Tim I Wilayah Utara (Kecamatan Jetis, Kecamatan Gendongtengen, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Danurejan) dengan Jumlah personil 22 orang. Kemudian Tim II Wilayah Tengah (Kecamatan Gondomanan, Kecamatan

Kraton, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Pakualaman) dengan 20 orang. Dan Tim III Wilayah Selatan (Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede) dengan 23 orang personil melaksanakan tiga kegiatan sapaan dan pejangkauan, pembinaan dan pedampingan, dan di dampingi Sekretariat terdiri dari 5 personil.

Kegiatan penjangkauan ini lakukan satu tahun sekali, dimana pada tahun 2014 wilayah yang paling banyak terjaring anak jalannya yaitu wilayah Jetis dan Tegalrejo jumlah anak jalanan yang terjaring berjumlah 17 dan 18 orang. Dengan adanya Tim Pekerja Sosial Masyarakat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengharapkan lebih efektifnya dan lebih mudahnya menjangkau anak-anak jalanan yang berada di kota Yogyakarta. Anak jalanan yang terdapat atau terjaring oleh tim PSM kemudian di berikan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kemudian diserahkan ke lembaga sosial yaitu rumah singgah untuk di berikan pendidikan, pelatihan dan pembinaan.

c. Lembaga Sosial

Kemudian ada juga Program Lembaga Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Ini bertujuan untuk yang anak jalanan yang sudah terjaring oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta maupun Tim Pekerja Sosial Masyarakat akan dimasukkan ke rumah singgah. Dimana ada 2 rumah singgah yaitu rumah singgah Ahmad Dahlan dan Mandiri. Anak jalanan yang berada dirumah singgah tersebut, tidak akan selamanya hidup di pembinaan maupun hidup dibawah tanggungan orang tua. Untuk hal itu selain pendidikan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta juga memberikan program pelatihan kepada anak jalanan. hal tersebut dibuat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan lembaga sosial atau dalam hal ini rumah singgah.

Adapun pelatihan yang diberikan oleh lembaga sosial yaitu pelatihan stell roda, tambal ban dan gunting rambut, pelatihan ini di lakukan seminggu sekali. Dengan adanya pelatihan tersebut anak tersebut apabila mereka keluar dari lembaga sosial tersebut mereka siap untuk bekerja dan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Yogyakarta akan memberikan anak tersebut modal untuk mereka membuat usaha sendiri.

d. Lembaga Pendidikan

Program yang dibuat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang untuk mengurangi jumlah angka anak yang berada dijalanan yaitu adanya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan disini yang dimaksudkan Dinas yang membuat sebuah kebijakan yang kepada anak jalanan yang sudah terjaring akan di berikan program pendidikan seperti anak jalanan difokuskan untuk masuk SMK supaya mereka siap untuk bekerja.

Di samping itu ada juga diberikan kebijakan pendidikan bagi anak jalanan untuk bersekolah ikut paket A,B,C namun tidak dipaksakan. Hal tersebut dibuat guna memberikan pendidikan yang lebih baik membuat pola pikir yang baik dan membuat kehidupan yang lebih baik terhadap anak jalanan untuk kedepannya. Jadi disini maksudkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta memberikan kepada anak jalanan yang sudah terjaring oleh tim, akan diberikan atau dimasukan ke dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini berupa pemberian sekolah lagi bagi anak jalanan yang terjaring dengan bentuk memberikan sekolah dengan sistem paket yaitu A,B, dan C. Dengan adanya sekolah tersebut diharapkan anak jalanan yang sudah terjerumus ke jalanan dapat berubah pola pikirnya menjadi lebih baik, sehingga menghindarkan mereka dari hidup terluntang-lantung di jalanan. Anak jalanan yang terjaring oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kemudian dimasukan kedalam lembaga pendidikan dan diberikan pendidikan berupa sekolah paket atau di fokuskan masuk ke SMK supaya mereka siap bekerja yang diberikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Dengan demikian hal-hal tersebut dibuat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mampu mengurangi jumlah anak yang berada di jalanan dan meberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat terutama khususnya anak jalanan.

Dengan demikian adanya program-program yang sudah dibuat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tentunya adanya kegiatan-kegiatan penangan untuk anak jalanan tersebut.

Pertama, kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan anak jalanan yang terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat sejumlah 70 orang yang mana untuk menjangkau kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh anak jalanan yang melakukan hal-hal negatif kemudian dijaring dan dilaporkan kepada Dinas Sosial dan Lembaga sosial agar diberikan bimbingan. Kedua, pembinaan anak jalanan yang dilakukan di kota Yogyakarta dengan target pertahunnya dengan target 40 anak tersebut diharapkan tiap tahunnya mampu mengurangi jumlah anak jalanan.

Ketiga, pendekatan anak jalanan dengan target 60 anak yang untuk meminimalisir terjadinya peningkatan akan lebih banyak anak jalanan yang hidup di jalanan dengan adanya pendekatan tersebut mampu meminimalisir angka anak jalanan. Kemudian ke empat diberikannya pemasangan papan himbauan yang terletak di 44 titik lokasi agar masyarakat dan anak jalanan menjauhkan diri dari hidup di jalanan.

Kemudian didalam pelaksanaan penanganan anak jalanan agar penanganan tersebut dapat terarah dan dapat efektif maka pelaksanaan tersebut dibagi menjadi 3 tim kerja :

- 1) Tim I Wilayah Utara (Kecamatan Jetis, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Gondokusumo dan Kecamatan Danurejan) dengan 22 (dua puluh dua) personil melaksanakan tiga kegiatan sapaan dan pejangkauan, pembinaan dan pedampingan.
- 2) Tim II Wilayah Tengah (Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Pakualaman) dengan 20 orang personil melaksanakan tiga kegiatan sapaan dan pejangkauan, pembinaan dan pedampingan.
- 3) Tim III Wilayah Selatan (Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede) dengan 23 orang personil melaksanakan tiga kegiatan sapaan dan pejangkauan, pembinaan dan pedampingan.
- 4) Sekretariat terdiri dari 5 personil.

Dengan adanya pembagian 3 wilayah tersebut dapat diharapkan dengan 3 kegiatan yang dilakukan yaitu sapaan dan pejangkau, pembinaan dan pendampingan diharapkan mampu bekerja efektif dan efisien dikarenakan dengan yang sudah dibagi 70 personil yang dibagi sesuai dengan daerahnya dapat fokus dan menjangkau anak jalanan yang dengan mudah sesuai wilayahnya. Hal tersebut sudah sepantasnya dilakukan dengan adanya pembagian 3 wilayah ternyata sangat efektif terhadap penurunan angka

jumlah anak jalanan terlihat dari tahun ke tahunnya sehingga tahun 2014. Untuk itu perlu kiranya peningkatan lagi kegiatan-kegiatan tersebut yang untuk mengurangi angka anak jalanan yang ada di kota Yogyakarta.

Kemudian dengan berhasilnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani penurunan jumlah angka anak jalanan tentu tidak terlepas dari tahapan-tahapan berikut :

1. Sapaan dan pejangkauan

Sapaan dan pejangkauan ini dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat. Dimana melakukan pengamatan titik titik tertentu yang digunakan untuk aktivitas di jalanan, kunjungan dan membangun komunikasi terhadap anak/pelaku aktivitas jalanan secara rutin, kunjungan dan membangun komunikasi terhadap anak atau pelaku aktivitas jalanan secara rutin, Melakukan “teror” psikologi secara halus terhadap pelaku aktivitas jalanan, melakukan monitoring dalam rangka “sterilisasi” lokasi yang masih bersih dari aktivitas jalanan.

Tahapan ini dilakukan oleh dinas bertujuan untuk melihat dan mengetahui kondisi anak jalanan tersebut dan membangun pendekatan yang baik terhadap anak jalanan tersebut yang untuk nanti diharapkan mampu mengurangi angka anak jalanan di kota Yogyakarta.

2. Pembinaan

Pembinaan ini dilakukan oleh Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan Tim Pekerja Sosial Masyarakat. dimana melaksanakan kegiatan supervisi bagi anak pelaku aktivitas jalanan dan keluarganya yang masih rentan kembali ke jalan, melakukan motivasi dan pengkondisian agar anak pelaku aktivitas jalanan tidak beraktivitas di jalanan, melakukan kegiatan supervisi keluarga agar anak atau pelaku aktivitas jalanan bisa mendapatkan hak-haknya secara optimal, melaksanakan langkah-langkah aksesing penanganan lanjutan bagi anak (pendidikan formal atau informal, kesehatan, tumbuh kembang anak) dan keluarganya (akses pemberdayaan ekonomi, peran sosial dan program-program lain yang terkait dengan penanganan keluarga anak jalanan), melaksanakan kegiatan penyadaran masyarakat terkait aktivitas jalanan dan bentuk bentuk penarikan sumbangan yang tidak sah lainnya melalui sosialisasi di tingkat basis.

Dengan adanya tahapan tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengharapkan dengan adanya pembinaan yang struktur yang baik terhadap anak

jalan yang ditangani dapat menjadikan penurunan angka anak jalanan yang berada di wilayah kota Yogyakarta untuk itu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sangat bekerja keras dalam tahapan pembinaan menangani anak jalanan sehingga impactnya kota Yogyakarta akan bebas dari anak jalanan

3. Pendampingan

Pendampingan dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat, dimana melaksanakan kegiatan supervisi bagi anak selaku aktivitas jalanan dan keluarganya yang sudah tidak lagi beraktifitas di jalanan, melakukan motivasi dan pengkondisian agar eks anak atau pelaku aktivitas jalanan konsisten dalam memenuhi aktivitas kembali ke pendidikan atau berusaha yang memenuhi kaidah sosial, melakukan komunikasi terhadap stakeholder dimana eks anak/pelaku aktivitas jalanan atau keluarganya mendapatkan pelayanan lanjutan.

Dengan adanya tahapan tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengharapkan dengan adanya pendampingan yang baik terhadap anak jalanan yang ditangani dapat membuat anak jalanan tersebut mampu berpikir dengan baik, dengan pola yang sudah dibentuk diharapkan mereka tidak akan mengulangi hidup di jalanan dan hal itu diharapkan mampu mengurangi anak jalanan di kota Yogyakarta.

Terlepas dari tahapan tersebut mampu untuk mengurangi angka penurunan jumlah anak jalanan pembiayaan anggaran yang struktur yang baik agar program-program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai diharapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani anak yang berada di jalanan.

Kemudian dari aspek pembiayaan anggaran yang dikurirkan untuk mengatasi masalah anak yang berada di jalanan di kota Yogyakarta. Dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Khusus nya yang menangani masalah anak jalanan adalah bidang Rehabilitasi dan Pelayanan sosial. Anggaran yang diambil dari 2 tahun yaitu dari tahun 2013-2014 :

a. Anggaran tahun 2013 :

- Pembinaan Anak Jalanan kota Yogyakarta sebesar Rp. 14.634.000
- Peningkatan Peranserta masyarakat dalam penanganan anak jalanan sebesar Rp. 78.890.000
- Pendekatan Anak Jalanan Rp. 28.621.000

b. Anggaran tahun 2014 :

- Pembinaan Anak Jalanan kota Yogyakarta sebesar Rp.30.639.000
- Peningkatan Peranserta masyarakat dalam penanganan anak jalanan sebesar Rp. 161.110.000
- Pendekatan Anak Jalanan Rp. 25.013.000

2. Kualitas Pelayanan

Isu mengenai kualitas pelayanan cenderung semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

Pengukuran kualitas pelayanan organisasi publik dilakukan untuk mengukur seberapa jauh tingkat pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terhadap anak jalanan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta khususnya dalam hal ini yang menangani masalah anak jalanan adalah Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.

Di dalam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani masalah anak jalanan yang untuk kiranya meminimalisir anak jalanan yang berada di jalanan kota Yogyakarta dalam hal ini di dalam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melakukan pelayanan kepada anak jalanan hal tersebut juga agar anak jalanan itu merasa diperhatikan. Dalam pelayanan yang dilakukan oleh dinas ini adalah yang pertama assesment. Assesment disini maksudkan adalah jika anak jalanan tersebut mengadu yang sesuai kebutuhan mereka yang positif maka dari Didalam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mempersiapkan wadah bagi anak jalan mengadu sesuai dengan keinginannya. Dengan begitu anak-anak jalanan yang merasa dipinggirkan selama ini dapat diperhatikan oleh masyarakat maupun Dinas di wilayah kota Yogyakarta. Tentu hal tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta guna menangi atau menurunkan angka anak jalanan yang ada di kota Yogyakarta yang khususnya yang menjadi kewajiban oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terhadap masyarakatnya.

Selain itu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memberikan

pelayanan yang membuat pelatihan terhadap anak jalanan yang telah terjaring dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan anak-anak jalanan ini mampu menghasilkan karya sendiri, mampu menghasilkan uang sendiri tanpa harus terluntang-luntung di jalanan. Dengan begitu ini menjadi tugas berat bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan yang berada di kota Yogyakarta yang untuk menurunkan jumlah angka anak jalanan yang berada di kota Yogyakarta dan dengan kualitas pelayan ini diharapkan angka anak jalanan tersebut bisa berkurang dari tahun ke tahunnya.

Selain dari bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani masalah anak jalanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta juga mempunyai inovasi pelayanan dalam menangani masalah anak jalanan di kota Yogyakarta yaitu dengan adanya pendekatan terhadap anak jalanan.

Pendekatan ini dimaksudkan adalah penanganan oleh pihak terkait Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk merazia yang sudah hidup di jalanan dan diubah menjadi penjangkauan kemudian diberikannya pendekatan secara kekeluargaan. Dengan adanya pendekatan tersebut diharapkan anak jalanan tersebut tidak merasa kesendirian ditanyakan apa kebutuhan mereka sehingga dari hal tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bisa memikirkan cara, menemukan solusi untuk menangani anak jalanan tersebut sehingga nantinya permasalahan itu membangun kesadaran anak jalanan tersebut dengan adanya pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi jumlah angka anak yang berada di jalanan kota Yogyakarta.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda pelayanan, dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memberikan pelayanan kepada anak yang berada di jalanan kota Yogyakarta dan bagaimana tanggapan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani masalah anak yang berada di jalanan Kota Yogyakarta.

Kemampuan responsivitas perlu dimiliki oleh seorang pegawai dalam organisasi pemerintah agar kinerja dari pegawai tersebut baik. Responsivitas merupakan kemampuan pegawai dalam menanggapi keluhan dari masyarakat bagaimana kinerja yang diberikan mereka tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat serta kemampuan pegawai tersebut dalam memberikan solusi atas keluhan dari masyarakat tersebut.

Di dalam halnya menangani anak jalanan yang berada di kota Yogyakarta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta haruslah memiliki responsivitas yang sangat cepat dan tepat terhadap pengaduan tentang anak jalanan tersebut tentu dengan hal itu sangat penting sekali bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk merespon dengan cepat guna meminimalisir permasalahan anak jalanan yang ada, misalnya, dari masyarakat mengadu ke dinas adanya anak jalanan yang berlaku negatif tentu hal ini cepat cepat diambil langkah agar tidak terjadinya hal yang diinginkan kemudian yang lebih penting pengaduan dari anak jalanan tersebut dikarenakan dengan adanya responsivitas yang cepat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, anak jalanan yang ingin menyampaikan aspirasi atau kebutuhannya yang sesuai keinginannya bisa dapat terpenuhi dengan solusi yang baik. Tentu dari hal itu mampu menjadikan berubahnya pola pikir anak tersebut menjadi lebih baik lagi tanpa hidup di jalanan.

Responsivitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berupa Unit Pelayanan Informasi Keluhan (UPIK). UPIK tersebut dimaksudkan melalui sms yang diadukan oleh masyarakat ataupun anak jalanan yang ditujukan kepada dinas yang bersangkutan yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kemudian di diskusikan dengan lembaga-lembaga yang ada. Dengan hal tersebut mampu memberikan solusi yang kepada pengaduan tersebut yang nantinya menjadikan jalan keluar yang baik dari pemerintah, masyarakat ataupun anak jalanan itu sendiri. Untuk itu dengan adanya UPIK tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengharapkan kenyamanan dari masyarakat dan berkurangnya anak-anak yang berada di jalanan kota Yogyakarta.

Dengan demikian dengan adanya responsivitas yang sigap dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan ternyata sejauh ini berjalan dengan baik terhadap kinerja Dinas ini. Di karenakan dengan adanya Responsivitas ini

anak jalanan bisa mengeluarkan unek-unek nya kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bisa mencari solusi yang baik. Dan pada akhirnya pada tahun 2014 jumlah angka anak jalanan berkurang. Dengan begitu dapat dikatakan kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dilihat dari responsivitas sangatlah baik dikarenakan mersepon pengaduan-pengaduan yang sigap. Sehingga hal tersebut mampu menambah dorongan untuk mengurangi jumlah angka anak jalanan di kota yogyakarta.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit dan sarana dan prasarana yang mendukung. Dimana dalam hal ini apakah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sudah menjalankan tugasnya berdasarkan visi misi yang sudah ada dalam hal ini menangani masalah anak yang berada di jalanan. Dan untuk mendukung itu semua dalam menangani anak yang berada di jalanan diperlukan sarana dan prasarana untuk di berikan kepada anak jalanan yang berada di kota yogyakarta.

Responsibilitas menjelaskan bagaimana program atau kegiatan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta khususnya di Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial apakah sudah sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dibuat.

Di dalam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani proses anak jalanan tentu sudahlah hal tersebut menjadi suatu kewajiban yang mana membuat program dalam menangani anak jalanan yang sesuai Visi dan Misi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam hal ini penulis mendapatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta sudah menjalankan Visi Misi tersebut dilihat dari aspek jumlah anak jalanan yang berada di kota yogyakarta dari tahun ke tahunnya. meskipun masih ada sedikit lagi ada anak jalanan yang masih berkeliaran di kota yogyakarta. Dengan begitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta harus lebih bekerja keras lagi dalam halnya meningkatkan responsibilitas untuk mengurangi jumlah angka anak jalanan.

Kemudian dari Visi Misi tersebut agar menjadikannya penanganan yang baik terhadap penurunan angka anak jalanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini menyediakan penyediaan sarana dan prasarana yang untuk di berikan kepada baik pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan untuk anak-anak jalanan di wilayah kota yogyakarta. Penyediaan prasarana dan sarana dalam hal nya untuk mengurangi jumlah anak jalanan. Pertama, dimulai dari peningkatan pegawainya yang sudah dibagi menjadi bidang-bidang tersebut. Salah satunya diberikan setiap bidang mobil dinas satu. Ini guna untuk memudahkan para bidang mudah berkomunikasi, mudah menjangkau anak jalanan yang berada di jalanan agar yang untuk meminimalisir anak-anak yang berada di jalanan.

Di samping itu untuk prasarana dan sarana untuk anak jalanan masih membutuhkannya inovasi baru. Dikarenakan anak-anak yang sudah mengikuti pelatihan hanya sampai disitu, karena pelatihan yang diberikan hanya itu-itu saja, pelatihan yang diberikan tidak berdasarkan dengan bakat yang dimiliki oleh anak jalanan tersebut. Ini membuat anak tersebut tidak bisa berkembang dikarenakan inovasi pelatihan untuk anak jalanan masih kurang.

Dengan demikian responsibilitas terhadap kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yaitu pertama yang sesuai dengan Visi Misinya sudahlah sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dari Dinas tersebut. Namun dalam hal Sarana dan Prasaran yang untuk anak jalanan masihnya kurang dikarenakan masih butuhnya inovasi pelatihan yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun pelatihan tersebut masih terus dilakukan. Dengan demikian untuk itu dari sarana dan prasarana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta harus bekerja keras lagi untuk menemukan inovasi baru yang diharapkan untuk mengurangi jumlah angka anak jalanan di kota yogyakarta dan nantinya adanya inovasi-inovasi yang baru dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta diharapkan mampu lagi menjadikan kota yogyakarta yang bebas dari anak yang berada di jalanan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Di dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta khususnya Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan sosial para pegawainya mempunyai tanggung jawab terhadap setiap tindakan, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya dalam melayani masyarakatnya khususnya dalam masalah anak jalanan yang ada di kota Yogyakarta. Dimana mempunyai suatu kewajiban untuk menjalankan tugas yang di berikan masyarakat terhadap para pegawai di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta khususnya Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dalam menangani masalah anak yang berada di jalanan di kota Yogyakarta..

Akuntabilitas yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah seberapa jauh keterbukaan para pegawai dalam bekerja, serta seberapa besar tanggung jawab organisasi publik tersebut untuk memperbaiki program yang telah direncanakan serta kedisiplinan dari para pegawai, agar kedepannya program yang dilaksanakan akan lebih baik lagi untuk kedepannya.

Di dalam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta komunikasi antar pegawai berjalan dengan baik dan kedisiplinan yang tinggi dalam menangani suatu masalah atau dalam bentuk melayani masyarakat, itu tidak terlepas dari komunikasi yang baik dan kedisiplinan dari para pegawai. Dikarenakan dengan adanya keterkaitan tersebut, dengan adanya suatu masalah dengan birokrasi atau masyarakat bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan aturannya tak terkecuali masalah menangani anak jalanan. Di dalam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang untuk menangani anak jalanan Dinas ini mempersiapkan kedisiplinan yang tinggi dan komunikasi yang baik antar pegawai sehingga ketika adanya kasus pelayanan anak jalanan pegawai-pegawai dalam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mampu sigap menangani masalah-masalah yang ada di jalanan yang guna untuk memberikan solusi atau pelayanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya anak jalanan. Dengan adanya

kedisiplinan, keterbukaan, komunikasi yang baik dari pegawai di harapkan mampu mengurangi angka anak jalanan yang berada di kota Yogyakarta.

Dengan demikian dengan adanya keterbukaan dan kedisiplinan pegawai di dalam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ternyata sangat bermanfaat bagi penurunan anak jalanan di kota Yogyakarta di tahun 2014. Dikarenakan dengan adanya komunikasi yang baik antar pegawai dalam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bisa menyelesaikan tentang masalah-masalah anak jalanan yang memberikan solusi yang baik sehingga menyebabkan penurunan jumlah angka anak jalanan. Untuk itu kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dilihat dari aspek akuntabilitas yang dilihat dari kedisiplinan, komunikasi dan keterbukaan antar pegawai sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya itu dampaknya di tahun 2014 jumlah angka anak jalanan berkurang menjadi 54 orang. Meskipun demikian hal tersebut harus lebih ditingkatkan untuk mengurangi jumlah angka anak jalanan yang ada di kota Yogyakarta.

Di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta khususnya Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dalam masalah jam Pulang kantor tidak berdasarkan dengan Jam Pulang. Dimana jam Masuk kantor Di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Jam 7.30 WIB.. Dimana para pegawai sudah berada di kantor dan melaksanakan apel pagi. Dan jam pulang kantor yaitu jam 15.30 WIB. Tetapi para pegawai di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Khususnya Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial jam pulang tidak berdasarkan jam pulang yang telah ditetapkan. Karena para pegawai bekerja tidak hanya di kantor saja, para pegawai ada tugas terjun lapangan. Dalam hal menangani masalah anak jalanan yang ada di kota Yogyakarta para pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak bisa hanya bekerja di kantor, mereka harus turun ke lapangan, ini bertujuan untuk pendekatan, penjangkauan terhadap anak jalanan yang berada di kota Yogyakarta.

Dengan demikian kedisiplinan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Khususnya dalam hal ini Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dimana mereka sudah menjalankan tugas mereka dengan semestinya ,kedisiplinan para pegawai sudah baik. Dengan baik nya kedisiplinan para pegawai ini dapat pula menunjang kinerja yang baik pula dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Ini juga dapat dilihat dari jumlah angka anak jalanan yang berada di kota yogyakarta di tahun 2014 dengan jumlah 54 orang.

Untuk kedepannya kedisiplinan dari para pegawai di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta harus lebih di tingkatkan agar jumlah anak jalanan setiap tahunnya berkurang atau tidak ada laginya anak jalanan yang berada di jalanan kota yogyakarta.

V. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tentang Penertiban Anak Jalanan, khususnya bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang menangani masalah anak jalanan. Penelitian yang penulis dapatkan tentang Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Dalam Penertiban Anak Jalanan Tahun 2014, dilihat dari kelima aspek, yang pertama aspek produktifitas program-program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta khususnya Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan sosial yang menangani masalah anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta, program tersebut ada pendekatan terhadap keluarga dimana pendekatan keluarga ini dilakukan kepada keluarga anak jalanan yang sudah terjaring, di berikan pemahaman terhadap keluarga atau orang tuanya tentang hak-hak anak pengawasan orang tua terhadap anaknya. Kemudian ada program masyarakat dimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta membentuk sebuah Tim Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan anggota 70 orang di bagi menjadi 3 wilayah yaitu wilayah utara 22 orang, wilayah tengah 20 orang, wilayah selatan 23 orang dan di dampingi sekretaris terdiri dari 5 orang. Selanjutnya ada program lembaga sosial dimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta membuat sebuah kebijakan dimana anak jalanan yang sudah

terjaring apabila anak tersebut mau masuk Lembaga Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah menyediakan rumah singgah ahmad dahlan dan rumah singgah anak mandiri dimana di dalam rumah singgah tersebut anak jalanan di berikan pelatihan. Kemudian yang terakhir ada program Lembaga pendidikan, disini dimaksudkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta membuat sebuah kebijakan yang kepada anak jalanan yang sudah terjaring mereka di berikan pendidikan, dan di fokuskan masuk ke SMK supaya mereka siap bekerja dan ada kebijakan lain juga yaitu ikut program paket A,B,C.

Kemudian Aspek kualitas pelayanan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melakukan pendekatan terhadap anak jalanan dengan mendengarkan dan menanyakan kebutuhan apa yang dibutuhkan anak jalanan dan nantinya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memikirkan caranya atau mencarikan solusinya. Aspek responsivitas, bagaimana tanggapan Dinas tersebut dalam menanggapi masalah, apabila ada pegaduan dari masyarakat tentang ada anak jalanan yang berada di jalanan, apabila ada anak jalanan yang berlaku negatif. Dimana dalam hal ini dinas bekerja sama dengan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Masyarakat mengadu ke UPIK melalui Sms kemudian UPIK melaporkan kepada Dinas yang bersangkutan. Aspek responsivitas, pencapaian program dari Dinas tersebut sudah sesuai dengan visi misi yang telah dibuat dan membuat sarana dan prasarana yang di tujukan kepada anak jalanan tetapi pelatihan nya hanya itu-itu saja masih kurangnya inovasi. Dan yang terakhir aspek akuntabilitas, Komunikasi antar pegawai sudah baik dan kedisiplinan para pegawai juga sudah baik.

Dari kelima aspek tersebut yang berpengaruh terhadap menurunnya jumlah anak jalanan yaitu aspek produktifitas. Dimana aspek produktifitas ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta membuat program keluarga, masyarakat, lembaga sosial dan lembaga pendidikan. Ke empat program tersebut sangat berpengaruh terhadap turunya jumlah anak jalanan yang berada di Kota Yogyakarta.

Jumlah angka anak jalanan di Yogyakarta dari tahun ke tahun. pada tahun 2010-2014 jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2010 jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta 142 orang. Di tahun selanjutnya tahun 2011 terjadi

penurunan anak jalanan yang di Kota Yogyakarta sebanyak 85 orang, sedangkan di tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah anak jalanan di kota Yogyakarta sebanyak 214 orang. Di tahun selanjutnya tahun 2013 jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta terjadi penurunan menjadi 58 orang dan di tahun 2014 terjadi lagi penurunan jumlah anak jalanan yang ada di kota Yogyakarta sebanyak 54 orang. Jadi Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sudah cukup baik di lihat dari jumlah anak jalanan di tahun 2014 . jumlah anak turun menjadi 54 orang.

VI. SARAN

Sebagai informasi tambahan bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Aspek Responsibilitas kualitas pelayanan yang diberikan kepada anak jalanan jangan hanya memberikan 3 pelatihan saja, tambal ban, potong rambut dan stell roda. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta harus kreatif dan inovatif, harus ditingkatkan kerja sama dengan Masyarakat dalam hal ini Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lembaga Sosial supaya menemukan ide-ide baru tentang pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam penelitian serupa dan dapat memperdalam penelitian yang sudah ada, serta menggali faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta khususnya Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dalam menangani masalah anak jalanan sehingga lebih banyak hasil refrensi penelitian yang ada.

Daftar Pustaka

BUKU

Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*. 2015.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Hanitijo SoemitroRonny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

J.Moleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.

Mutiarin, Dyah dan Zaenudin, Arif. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Ratminto dan Atik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Suyadi Prawirasentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia "Kebijakan Kinerja Karyawan"* BPFE, Yogyakarta, 1999.

DOKUMEN DAN JURNAL

Anonim. *Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kota Yogyakarta Tahun 2011*. Yogyakarta: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2011.

Anonim. *Tugas Pokok dan Fungsi: Rincian Tugas Dinas Sosial Provinsi*. Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Bali, 2010.

Eriek Prayogie, *Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dalam Mengembangkan Desa Wisata 2013*

Rovi Hamsyah. *Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Program Kali Bersih 2011*

Sugestyadi, Bambang. *Pemberdayaan Anak Jalanan Di Malioboro Yogyakarta Dengan Pelatihan Komputer*. 2009.

<http://dokumen.tips/documents/artikel-anak-jalanan.html> (Diakses, 9 Oktober 2015)

Tantyo, Harry. *Kesejahteraan Sosial: Hak Masyarakat dan Kewajiban Negara*. http://www.academia.edu/8064323/KESEJAHTERAAN_SOSIAL_Hak_Masyarakat_and_Kewajiban (Diakses, 3 Oktober 2015)

INTERNET

<http://kbbi.web.id/tertib> (Diakses, 13 Oktober 2015)

file:///C:/Users/windows!/Downloads/UU_Nomor_23_Tahun_2014.pdf (Diakses, 10 November 2015)

http://www.cianjurkab.go.id/Daftar_Dinas_Nomor_18.html (Diakses, 9 November 2015)

http://yogyakarta.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2013/02/Perda_Nomor_6_Tahun_2011_tentang_Perlindungan_Anak_Yang_Hidup_di_Jalan.pdf
(Diakses, 7 Oktober 2015)

<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-jalanan-faktor-yang.html>